

**MENGUAK REALITAS SOSIAL DI BALIK SLUM AREA DI KAMPUNG
DUPAK MAGERSARI, KELURAHAN JEPARA**

**Galuh Yolla Kharisma¹, Nuriza Mahesti Putri Ifanda², Dinda Afiatik Mumtazah³,
Dea Angelina Putu Aji⁴, Febryan Fitto Prasdiansyah⁵**

^{1,2,3,4,5}Universitas Airlangga

mahestinuriza@gmail.com

ABSTRACT; *This study discusses urban problems stemming from the flow of urbanization and population density that continues to increase over time in political studies in the city, Dupak Magersari Village shows how the city of Surabaya continues to experience high development and population growth, the emergence of housing needs forces immigrants and vulnerable groups to occupy vacant land, such as railway lines. On the other hand, the programs provided by the government do not provide a solution to the problem of Dupak Magersari Village which is an illegal settlement and slum area. Researchers also found a pattern of intervention by the city government oligarchy in land-related policies, land conflicts have actually occurred for years and the Surabaya government has made people living in slum areas a political commodity, this is reflected in the pattern of existing policies. By using library data and field observation methods. Researchers found a pattern of intervention by the city government oligarchy in land-related policies, land conflicts have actually occurred for years and the Surabaya government has made people living in slum areas a political commodity, this is reflected in the pattern of existing policies.*

Keywords: *Urban Politics, Governance, Social Reality, Slum Areas, Economy and Poverty.*

ABSTRAK; Penelitian ini membahas masalah perkotaan yang bersumber dari arus urbanisasi dan kepadatan penduduk yang terus meningkat dari masa ke masa dalam studi politik di kota, Kampung Dupak Magersari menunjukkan bagaimana Kota Surabaya terus mengalami perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, munculnya kebutuhan akan tempat tinggal memaksa kelompok pendatang dan rentan untuk menempati lahan yang masih kosong, seperti rel kereta api. Disisi lain, program yang diberikan oleh pemerintah tidak menjadi solusi atas persoalan Kampung Dupak Magersari yang merupakan kawasan pemukiman liar dan slum. Peneliti juga menemukan pola intervensi oligarki pemerintah kota dalam kebijakan terkait tanah, konflik tanah sejatinya sudah terjadi bertahun-tahun dan pemerintah Surabaya menjadikan masyarakat yang tinggal di kawasan *slum* sebagai komoditas politik hal ini tercermin dalam pola kebijakan-kebijakan yang ada. Dengan menggunakan metode data pustaka dan observasi lapangan. Peneliti menemukan pola intervensi oligarki pemerintah kota dalam kebijakan terkait tanah, konflik tanah sejatinya sudah terjadi bertahun-tahun dan pemerintah

Surabaya menjadikan masyarakat yang tinggal di kawasan *slum* sebagai komoditas politik hal ini tercermin dalam pola kebijakan-kebijakan yang ada.

Kata Kunci: Politik Kota, Pemerintahan, Realitas Sosial, Slum Area, Ekonomi dan Kemiskinan.

PENDAHULUAN

Kemunculan *slum area* telah menjadi masalah umum di kota metropolitan, termasuk di Surabaya. Kepadatan penduduk kota memang menjadi sumber masalah-masalah sosial ekonomi yang selalu menyertai realitas kehidupan di kota. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia dengan total 3,9 juta jiwa (BPS, 2024). Selain itu, kota ini merupakan pusat ekonomi masyarakat Jawa Timur, di sekitarnya terdapat kota-kota satelit yang disebut dengan kawasan Gerbang Kertosusila yang juga merupakan kawasan industri dan ekonomi besar. Pemukiman kumuh bermunculan sebagai dampak dari kepadatan penduduk dan arus urbanisasi yang tinggi. Realitas sosial di balik pemukiman kumuh Surabaya mencerminkan betapa pesatnya proses urbanisasi dapat menimbulkan kesenjangan sosial.

Tingkat pendapatan yang rendah dan terbatasnya akses terhadap pekerjaan memaksa penduduk hidup dalam kondisi yang penuh sesak dengan sanitasi yang buruk dan risiko kesehatan yang tinggi. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Surabaya tetapi juga di kota-kota besar lainnya di Indonesia yang mengalami perkembangan pesat tanpa adanya upaya yang memadai untuk memerangi kemiskinan. Sayangnya, pertumbuhan jumlah penduduk Kota Surabaya tidak dibarengi dengan ketersediaan lahan yang baik dan memadai. Akibatnya, muncul pemukiman kumuh di kawasan-kawasan pinggiran dan pusat kota seperti Wonokromo, Kenjeran dan Pasar Turi. Sebagian besar kawasan permukiman kumuh dapat ditemui di sepanjang pantai timur Surabaya, bantaran sungai, rel kereta api dan pusat kota (Das, 2017).

Kawasan *slum area* Pasar Turi merupakan salah satu *slum area* terbesar dan masuk pada klaster ketiga (Zubaidah dkk, 2023). Area ini merupakan kawasan padat penduduk karena dekat dengan sumber ekonomi di pusat kota, serta searah dengan kawasan utara yang notabennya juga kawasan industri. Meski begitu, pemukiman ini sejatinya berdiri di kepemilikan tanah yang masih belum jelas karena mereka mendirikan rumah-rumah kecil

di sepanjang rel kereta api yang berada di bawah PT Kereta Api Indonesia. Selain persoalan legalitas tanah, banyak masalah lain yang masih menjadi dilema tersendiri. Perlu adanya penelusuran lebih lanjut terkait bagaimana kawasan kumuh ini muncul, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi. Terlepas dari faktor urbanisasi hal ini penting untuk mengungkap realitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat di wilayah ini dan untuk memahami tantangan serta strategi kelangsungan hidup yang mereka hadapi sehari-hari. Dalam wacana urbanisasi, istilah slum area sering dihubungkan dengan dua konsep yang mirip, yakni pemukiman kumuh dan pemukiman liar. Keduanya menjadi masalah yang signifikan dalam perencanaan kota, khususnya di negara berkembang, termasuk Indonesia (Ooi dkk, 2007)

Meskipun sering dianggap serupa, kedua istilah ini memiliki perbedaan mendasar, baik dalam karakteristik fisik, hukum, maupun dampaknya terhadap tata kelola perkotaan. Pemukiman kumuh merujuk pada area hunian yang tidak memenuhi standar minimum kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Kriteria ini meliputi buruknya akses terhadap air bersih, sanitasi yang tidak memadai, kepadatan penduduk yang tinggi, struktur bangunan yang rapuh, serta ventilasi udara yang buruk. Pemukiman kumuh umumnya terbentuk di area perkotaan yang padat, seperti bantaran sungai, pinggir rel kereta, atau kawasan industri. Permukiman kumuh sering kali diakui secara legal oleh pemerintah, meskipun dengan kondisi yang tidak layak huni (Julkarnain dkk., 2024). Penghuninya biasanya memiliki hak atas tanah atau bangunan, walaupun dalam banyak kasus, hak tersebut masih dalam proses penyelesaian administratif. Karena status hukum ini, pemerintah sering menysasar permukiman kumuh untuk program peremajaan kota (*urban renewal*) atau rehabilitasi, seperti program perbaikan rumah, penyediaan fasilitas air bersih, dan pembangunan sistem sanitasi.

Pemukiman liar yang merupakan area hunian yang berdiri di atas tanah tanpa izin atau hak legal. Pemukiman ini sering dibangun secara spontan oleh kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses ke perumahan formal. Lokasinya bisa berada di tanah pemerintah, lahan privat, atau zona larangan, seperti kawasan hijau dan daerah rawan bencana. Permukiman liar sering kali tidak diakui oleh pemerintah dan dianggap ilegal. Penghuninya tidak memiliki hak hukum atas tanah atau bangunan yang mereka tempati, sehingga rentan terhadap penggusuran. Selain itu, permukiman liar biasanya memiliki

akses terbatas atau bahkan tidak memiliki akses sama sekali terhadap layanan dasar, seperti listrik, air, atau sanitasi (Pristiandaru, 2023). Perbedaan utama antara pemukiman kumuh dan pemukiman liar terletak pada status legalitas dan pengakuan pemerintah. Pemukiman kumuh diakui secara legal, meskipun kondisinya tidak layak huni, sedangkan pemukiman liar tidak memiliki dasar hukum yang sah. Selain itu, pendekatan pemerintah terhadap kedua jenis pemukiman ini juga berbeda.

Pemukiman kumuh cenderung menjadi target program rehabilitasi dan peningkatan kualitas hidup, sedangkan pemukiman liar lebih sering menjadi objek penggusuran untuk mengembalikan fungsi lahan sesuai perencanaan kota. Baik pemukiman kumuh maupun pemukiman liar memberikan dampak signifikan terhadap tata kelola perkotaan (Zulkarnain dkk, 2024). Keduanya mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Disisi lain, mereka juga menciptakan tantangan sosial, seperti tingginya tingkat kemiskinan, kriminalitas, dan penyakit menular. Penting untuk mencatat bahwa penghapusan pemukiman kumuh dan pemukiman liar bukanlah solusi tunggal. Pemerintah harus memprioritaskan pendekatan yang berbasis inklusi, seperti menyediakan perumahan yang terjangkau, menciptakan lapangan kerja, serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan kota (Julkarnain dkk, 2024) . Dengan memahami perbedaan antara permukiman kumuh dan permukiman liar, pemangku kebijakan dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mengatasi permasalahan ini, menciptakan kota yang lebih layak huni, dan mendukung kesejahteraan masyarakat perkotaan.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang tinggal di slum area Kampung Dupak Magersari untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan mereka; (2) mengidentifikasi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang tinggal di slum area Kampung Dupak Magersari untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan mereka; (3) mengkaji bagaimana slum area mempengaruhi kondisi lingkungan, baik secara fisik (kebersihan, polusi, lingkungan) maupun sosial (interaksi masyarakat); (4) menganalisis peluang dan hambatan yang mungkin timbul dalam upaya pemberdayaan atau penataan kawasan slum area di sekitar stasiun.

Penelitian ini berusaha untuk menggali lebih dalam bagaimana pola dan realitas sosial pada masyarakat yang tinggal di daerah slum area. Termasuk di dalamnya adalah dengan memahami aspek pekerjaan, pendidikan, pendapatan, dan kondisi keluarga yang menjadi faktor penting dalam memahami pola kehidupan di area tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud untuk menelusuri faktor apa saja yang mendorong kemunculan daerah kumuh di tengah perkotaan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan, migrasi ke perkotaan, dan akses terhadap peluang ekonomi.

METODE PENELITIAN

Data yang diperoleh bersumber dari dilakukannya observasi lapangan di Jl. Dupak Magersari RW 9. Observasi ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat keadaan lingkungannya, seperti tata letak bangunan, kebersihan lingkungan, dan kualitas infrastrukturnya. Setelah melakukan observasi, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan melibatkan ketua RW dan ketua RT. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pemahaman, pengalaman serta upaya ketua RW dan Ketua RT dalam mengelola dan mengatasi permasalahan di wilayahnya. Pemilihan metode ini dikarenakan bertujuan untuk menggambarkan realitas sosial secara mendalam berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan dari lapangan. Fokus penelitian ini adalah mengungkap pola hidup, interaksi sosial, dan tantangan yang dihadapi oleh warga Kampung Dupak Magersari. Analisis deskriptif ini yang memerlukan reduksi data yang dimana memilih data yang relevan dengan fokus terhadap penelitian dalam melakukan penyusunan data dalam bentuk narasi, tabel dan visualisasi berupa foto maupun video.

Lokasi penelitian berada di pemukiman Jl. Dupak Magersari RW 9, Kelurahan Jepara, Surabaya. Area ini dipilih karena lokasinya yang berdekatan langsung dengan rel kereta api dan menempati area tanah milik PT KAI. Peneliti berusaha mencari informasi terkait permasalahan tata ruang, sanitasi dan kondisi sosial-ekonomi yang menjadi cerminan tantangan perkotaan. Dengan memusatkan penelitian pada RW 9, diharapkan penelitian ini mampu menjawab pertanyaan penelitian terkait slum area pemukiman di sekitar pasar Turi. Subjek penelitian melibatkan ketua RW 9 dan Ketua RT 1, 2, 3 dan 4 di wilayah Jl. Dupak Magersari, Jepara, Surabaya. Pemilihan informan ini didasarkan pada peran mereka sebagai pemimpin formal tingkat kecil di wilayah tersebut, yang dianggap memiliki pengetahuan lebih mendalam tentang kondisi lingkungan, masalah

sosial serta dinamika sosial-ekonomi warganya. Sebagai tokoh yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, mereka mampu memberikan informasi yang valid dan relevan terkait permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Peran strategis mereka dalam pengambilan keputusan juga memungkinkan peneliti memahami aspek struktural yang memengaruhi kehidupan di slum area ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Kemunculan *Slum Area* di Jl. Dupak Magersari RW 09

Penelitian terkait *slum area* yang ada di Jl. Dupak Magersari telah mengeksplorasi dan mengkaji realitas sosial perkotaan, mulai dari awal kemunculan hingga dinamika yang ada di dalamnya. Berdasarkan informasi dan temuan data di lapangan, masyarakat Kampung Dupak Magersari telah menempati kawasan sekitar rel Pasar Turi selama bertahun-tahun. Sejak tahun 1960-an kawasan sekitar rel Pasar Turi merupakan kawasan kosong dan tanpa penghuni. Belum banyak warga yang datang dan membangun rumah di area tersebut. Di sisi lain, kawasan ini sudah dibangun rel yang merupakan infrastruktur lawas dan warisan sejak era Belanda. Warga luar Surabaya mulai banyak yang datang sejak akhir tahun 1990 hingga awal tahun 2000. Pasca urbanisasi, masyarakat banyak yang memadati kawasan rel Pasar Turi. Mereka terus berkembang dan mulai bertambah dari tahun ke tahun. Rumah-rumah baru terus dibangun, seiring dengan penduduk yang terus berdatangan. Berdasarkan informasi dari Ketua RW, penduduk di pemukiman ini semakin lama semakin banyak. Mereka hidup dan tumbuh di sini dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mulai dari nenek buyut hingga anak keturunannya sama-sama menempati kawasan ini. Sebab itulah, masyarakat merasa adanya *sense of belonging* atas area tersebut. Mereka selama puluhan tahun telah menempati satu kawasan bersama.

Faktor lain yang menyebabkan pertumbuhan kepadatan penduduk di area sekitar rel adalah karena wilayah tersebut dekat dengan sumber dan jantung ekonomi kota yaitu Pasar Turi. Sejak dulu kawasan Pasar Turi merupakan pusat perbelanjaan dan aktivitas ekonomi terbesar terutama di kawasan Jawa bagian timur. Para pedagang dan pembeli datang dari berbagai daerah di Indonesia ke Pasar Turi. Berdasarkan data dari informan, beberapa kali terjadi kebakaran di Pasar Turi yang terjadi dipicu oleh kecerobohan warga tinggal di dalam pasar tanpa izin dari petugas. Kebakaran itu berujung pada Pasar Turi

menjadi sepi yang menyebabkan warga sekitar Magersari bergeser untuk berjualan di sekitar rel. Mereka mulai berjualan dan mendirikan gerobak di sekitar rel kereta. Meski begitu, melakukan aktivitas di sekitar kereta seperti berjualan sebenarnya merupakan tindakan ilegal karena tidak memiliki izin dari PT KAI. Menurut informan, sudah ada enam kali surat teguran dan peringatan untuk menggusur penduduk yang tinggal di area pemukiman serta warga yang berjualan di sekitar rel. Meski begitu hingga sekarang, himbauan itu hanya berupa teguran dan peringatan saja.

Ketua RW juga mengatakan, bahwa ia tidak setuju dengan perilaku dan tindakan ancaman KAI karena klaim atas kepemilikan tanah sekitar rel sebagai milik KAI sejatinya belum jelas. Dalam forum agraria yang pernah diadakan oleh Kelurahan Jepara dan dihadiri oleh informan beberapa waktu lalu, menunjukkan peta dimana area Dupak Magersari berstatus kosong, artinya tidak atas klaim PT KAI. Peta tersebut dikeluarkan oleh pemerintah kota. Menurut warga, aksi penggusuran tersebut tidak sah jika tanpa izin dan instruksi dari pemerintah kota. Kepemilikan tanah sendiri sebenarnya belum jelas, tidak ada batas meter tertentu mana yang menjadi milik PT KAI dan milik warga. Konflik area tanah ini juga sebenarnya ditujukan untuk area-area pemukiman yang langsung berdempetan dengan rel. Beberapa rumah yang tidak dekat rel tergolong aman dan diklaim milik warga sendiri. Meski begitu warga dan masyarakat sekitar mengaku bahwa sebenarnya mereka mau jika direlokasi dan dipindahkan ke area rusun dengan syarat harus dekat dengan tempat kerja mereka. Beberapa kali terjadi peringatan penggusuran oleh PT KAI terhadap warga Kampung Dupak Magersari, tindakan itu memicu amarah warga. Beberapa bahkan sempat mengalami bentrokan dan Ketua RW berada di barisan terdepan untuk melindungi warga.

Meski begitu antisipasi terhadap penggusuran di masa yang akan datang selalu ada. Informan mengatakan bahwasanya masyarakat sekitar beberapa berencana untuk mengantisipasi penggusuran dengan kembali ke kampung halaman, terutama orang-orang Madura yang merantau di Surabaya. Negosiasi terkait konflik tanah ini sejatinya bisa dilakukan dengan syarat ganti rugi yang diberikan pemerintah dan PT KAI harus sesuai dengan apa yang sudah mereka bangun disana dan itu memerlukan proses kompromi dalam waktu yang lama karena membutuhkan kesepakatan setiap kepala keluarga. Permasalahan terkait tanah ini juga beberapa kali dipicu oleh kejadian yang

mengganggu aktivitas kereta dan ditimbulkan oleh kegiatan pemukiman di sekitar rel kereta api. Menurut informan, beberapa masalah yang memicu teguran dari PT KAI adalah karena sampah rumah tangga yang kadang-kala jatuh di rel kereta. Meski begitu warga berharap agar pemerintah tidak berbuat semena-mena dan memperhatikan kepentingan masyarakat kecil.

Kondisi Demografi

RW 09 Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan yang tinggal di Jalan Dupak Magersari memiliki kurang lebih 1.600 jiwa dengan kurang lebih 400 kartu keluarga. Jumlah ini dirasa sudah sangat *overload* dengan luas lahan yang sempit. Keadaan ini disebabkan karena warga dari zaman dahulu telah beranak-pinak hingga sekarang dan semua keturunannya tinggal di tempat sama. Hal ini mengakibatkan bentuk rumah-rumah di Kampung Dupak Magersari kecil dan vertikal karena tidak begitu memiliki lahan luas untuk membangun rumah dalam bentuk horizontal. Angka kematian di sini relatif karena tidak ada penyakit yang menyebabkan kematian dalam jumlah banyak. Begitu pula dengan angka kelahiran juga relatif, karena tidak marak pernikahan dini dan di luar nikah.

Kondisi Ekonomi dan Kemiskinan

Pendapatan rata-rata masyarakat Kampung Dupak Magersari adalah Rp1.500.000 per bulan. Pendapatan ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan UMR Surabaya sebagai kota metropolitan terbesar kedua yang ada di Indonesia. Sebagian besar dari penduduk bekerja di sektor informal. Informan mengatakan pendapatan Rp1.500.0000 dalam sebulan tersebut didapatkan secara susah payah. Penduduk sebagian besar bekerja menjadi pedagang, kuli, dan tukang ojek. Para pekerja terutama laki-laki biasanya bekerja sebagai kuli atau pekerja kasar dari pagi sampai malam. Hanya sedikit masyarakat yang bekerja di sektor formal sebagai PNS atau bahkan pegawai BUMN hampir tidak ada. Masyarakat masih berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Meski begitu angka pengangguran masyarakat Dupak Magersari tergolong rendah. Sebagian besar masih bekerja, meski serabutan, beberapa bekerja di Pasar Loak, ada juga yang dekat di Pasar Turi, dan sebagian kecil bekerja jauh dari pemukiman. Sedangkan para perempuan membuka usaha kecil di depan rumah seperti jualan nasi, jajan, gorengan, dan minuman dingin.

Pasar selalu menjadi titik ekonomi masyarakat sekitar. Itulah mengapa mereka membangun tempat berjualan di sekitar rel kereta. Sebelum adanya revitalisasi, Pasar Turi sempat menjadi titik strategis ekonomi yang sangat menguntungkan. Masyarakat Dupak Magersari tinggal di belakang Pasar Turi yang dilewati oleh rel kereta barang dan penumpang yang mengangkut komoditas dan penumpang dari Stasiun Pasar Turi yang juga terletak tidak jauh dari kawasan pemukiman. Area pemukiman ini terletak di titik strategis yang dekat dengan pusat keramaian kota yaitu Pelabuhan Tanjung Perak di sebelah utara dan stasiun kereta di sebelah selatan. Masyarakat Kampung Dupak Magersari mencari mata pencaharian terutama di sekitar Pasar Turi. Sejak tragedi kebakaran pada tahun 2007 silam, beberapa penduduk mulai bergeser dan berjualan di sekitar rel. Beberapa usaha jualan penduduk sekitar kini mulai kalah saing dengan produk yang dijual secara *online*. Beberapa mengalami kerugian karena sepi pembeli dan keterbatasan kemampuan untuk beradaptasi dengan internet menjadi salah satu kendala. Guna menangani masalah tersebut, pemerintah kota beberapa kali telah melaksanakan program pemberdayaan UMKM yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan perekonomian.

Di sisi lain, tingkat pengangguran, konteksnya di sini adalah individu yang termasuk dalam angkatan kerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Biasanya, pengangguran ini dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, seperti pengangguran terbuka, yaitu mereka yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkannya; pengangguran terselubung, yaitu mereka yang bekerja di bawah kapasitas produktifnya; dan pengangguran musiman, yang terjadi pada sektor-sektor tertentu berdasarkan waktu atau musim. Jadi, pengangguran bukan hanya soal tidak bekerja sama sekali, tetapi juga mencakup kondisi-kondisi di mana seseorang belum bekerja sesuai potensinya. Meski begitu, peneliti menemukan fakta bahwasannya beberapa masyarakat di Kampung Dupak Magersari juga bekerja di sektor usaha dan pengrajin dandang. Usaha ini cukup berkembang dan menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Menariknya, mereka membangun usaha pembuatan dandang ini berdempetan dengan rel kereta api. Pemilik usaha ini merupakan masyarakat kampung sendiri dan mempekerjakan tetangga serta saudara yang tinggal di sekitar rel. Usaha ini telah mengundang beberapa komunitas untuk terus mengembangkan dan memberdayakan masyarakat melalui UMKM.

Beberapa waktu lalu pihak Kelurahan Jepara sendiri sudah beberapa kali mengusahakan supaya kawasan pengrajin dandang sendiri menjadi *spot* dan destinasi wisata untuk masyarakat Surabaya. Beberapa hari sebelumnya bahkan ada kunjungan dari mancanegara. UMKM dandang ini dikembangkan oleh masyarakat lokal sendiri dan bermanfaat langsung untuk mengurangi pengangguran. Sistem pemasarannya juga masih manual dengan didasarkan pada jumlah pesanan saja. Padahal jika terus dikembangkan secara masif dan memperoleh perhatian lebih dari pemerintah akan turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Usaha ini mendapatkan bantuan pemberdayaan dari Arkom Jatim (Arsitek Komunitas) dari Jawa Timur yang menjadi perantara warga dengan berbagai agenda kota. Komunitas ini berfokus untuk melakukan kerja sama dengan kelompok marginal perkotaan melalui pendekatan partisipatif.

Keterlibatan Aktor Politik

Pemerintah Kota Surabaya berperan untuk membantu masyarakat di Kampung Dupak Magersari yang notabennya sebagai slum area. Hal ini terlihat dari bantuan penerangan jalan umum (PJU) yang diberikan oleh Dinas Perhubungan. PJU akan dipasang selambat-lambatnya tahun ini. Sebenarnya, pengajuan PJU telah dilakukan RW 09 sejak 2021 silam tetapi baru digarap pada tahun 2024 oleh pemerintah kota. Selain pada aspek infrastruktur, pemerintah Kota Surabaya juga memberikan program pada bidang kesehatan melalui program Puskesmas Keliling (Pusling) dan Posyandu Keluarga (Posga). Program ini memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat di Kampung Dupak Magersari setiap hari Sabtu.

Selain dari pemerintah Kota Surabaya, terdapat pula partai politik yang ikut serta memberikan bantuan kepada masyarakat Kampung Dupak Magersari. Menurut pernyataan dari Ketua RT 3, Partai Golkar telah memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak yang bersekolah di jenjang sekolah dasar dan menengah. Selain untuk anak-anak pada jenjang tersebut, bantuan pendidikan dari Partai Golkar juga diberikan kepada anak-anak yang berkuliah melalui program bantuan pendidikan PIP. Sebenarnya, program bantuan pendidikan juga telah diberikan oleh pemerintah Kota Surabaya dengan memberikan pendidikan gratis pada tingkat dasar dan menengah. Program-program ini membuat masyarakat terbantu sehingga tingkat pendidikan di Kampung Dupak Magersari terjamin.

Pandangan Politik

Masyarakat kampung Dupak Magersari secara umum menyatakan kepuasannya terhadap kepemimpinan Eri Cahyadi selama memimpin kota Surabaya. Menurut mereka kepemimpinan Eri telah membawa banyak program dan bantuan yang mensejahterakan mereka. Di antaranya adalah Program Kader Surabaya Hebat yang banyak diikuti oleh para ibu-ibu kampung, Pusling, Puspaga, BOP, PJU, dan sebagainya. Sebelum kepemimpinan Eri Cahyadi, yaitu era Tri Risma Harini, masyarakat Dupak Magersari mengaku sangat puas dengan kepemimpinannya. Mereka antusias ketika mengetahui Risma maju dalam Pilgub Jatim 2024 ini. Menurut mereka Risma adalah sosok yang mengayomi dan selalu bekerja untuk turun langsung ke lapangan. Dalam beberapa kejadian kebakaran di pasar Turi misalnya, Risma selalu menghimbau dan memastikan supaya warga yang tinggal di Dupak Magersari diamankan terlebih dahulu.

Beberapa RT di kampung ini memiliki basis dan preferensi politik yang berbeda satu sama lain. Misalnya RT 02 sebagian besar masyarakat adalah loyalis PDIP sehingga sangat mendukung Risma untuk maju pada Pilkada 2024. Di sisi lain, mereka juga bimbang ketika mengetahui Khofifah mencalonkan diri lagi. Secara kultural, masyarakat RT 02 didominasi oleh warga Nahdliyin. Meski begitu, informan lain mengatakan bahwa mereka mendukung Khofifah karena kedekatan kultural serta kesamaan identitas organisasi. Masyarakat Madura yang mendominasi beberapa titik RT terutama RT 03 dan RT 04 sebagian besar juga merupakan anggota Muslimat. Hal ini berakibat pada dukungan yang mengalir untuk Khofifah semata-mata disebabkan oleh faktor organisasi. Di samping itu, informan mengaku bahwa dukungan terhadap Risma diberikan karena memang memiliki kualitas kinerja dan kebijakan yang sangat bagus. Selain dari segmentasi NU dan PDIP, sebagian penduduk juga merupakan basis Partai Golkar terbukti dengan adanya bantuan Pendidikan untuk masyarakat sekitar RT 03.

Pembahasan

Pemerintah Kota Surabaya melihat permasalahan *slum area* sebagai masalah yang harus diatasi karena berkaitan dengan *face of the city* Surabaya sebagai metropolitan terbesar kedua di Indonesia. Persoalan terkait *slum area* terutama dalam kasus Kampung Dupak Magersari juga erat kaitannya dengan pemukiman liar. Di Surabaya, masalah pemukiman liar adalah masalah yang sudah muncul sejak era pasca kemerdekaan.

Urbanisasi menjadi faktor utama bagaimana arus perpindahan masyarakat ke area urban telah menciptakan persoalan baru berupa pemukiman kumuh dan pemukiman liar. Kampung Dupak Magersari termasuk dalam kategori pemukiman liar, meski penduduk mengklaim telah menempati kawasan itu selama puluhan tahun. Akan tetapi secara sah tanah yang berdekatan dengan rel kereta api dimiliki oleh PJKA. Masyarakat mengaku tahu hal itu akan tetapi mereka tetap menolak untuk dipindahkan, penolakan ini didasari karena kepentingan mereka sebagai pekerja yang mencari penghidupan di sekitar rel kereta. Di sisi lain, kawasan ini juga tergolong sebagai area *slum*, berdasarkan UU No 1 Tahun 2011, faktor yang menyebabkan suatu pemukiman disebut kumuh adalah ketika kawasan tersebut tidak layak huni karena kepadatan penduduknya, kualitas bangunan yang tidak memadai, bangunan-bangunan yang sempit, serta serba kekurangan (Saud & Navitas, 2015).

Faktor-faktor Slum Area

No.	Faktor Pengelompokan	Faktor Anggota
1.	Faktor Sebab	1. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi 2. Ruang terbuka yang terbatas 3. Penghasilan rendah dari pekerjaan informal yang masih dijalankan oleh warga sekitar di pemukiman kumuh 4. Keterbatasan suatu lahan pemukiman 5. Kurangnya perhatian pemerintah dalam menanggapi adanya permukiman kumuh 6. Kesadaran masyarakat yang rendah pula terhadap pemeliharaan lingkungan disekitar

2.	Faktor Akibat	1. Penyaluran air bersih yang tidak merata 2. Drainase saluran air yang tidak cukup memadai 3. Buruknya fasilitas sampah yang ada 4. Kepadatan penduduk yang cukup tinggi 5. Kondisi sanitasi lingkungan yang tidak layak 6. Bentuk jalan yang tidak layak baik dari segi perkerasan maupun jalan lebar.
----	---------------	--

(Saud & Navitas, 2015)

Masyarakat Dupak Magersari memiliki keterbatasan lahan untuk membangun pemukiman yang lebih layak, mereka tinggal secara berdekatan di gang-gang kecil dekat rel yang rawan kecelakaan, meski begitu mereka memiliki pola pikir dan kesadaran yang cukup baik akan lingkungan, pendidikan dan kesehatan (Dinsos, 2018) . Secara umum masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh tidak selalu memiliki kualitas sumberdaya manusia yang buruk, sebagian besar penduduk memiliki kesadaran pendidikan dan kualitas kesehatan yang baik, sudah banyak anak muda yang kuliah di perguruan tinggi. Pemerintah Kota Surabaya sendiri merespon persoalan *slum* dengan RSDK atau program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh, program RSDK yang bersifat *bottom-up* melibatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat melalui kolaborasi antara Dinas Sosial dan *stakeholder* terkait dalam implementasi program tersebut. Implementasi program RSDK melibatkan Dinas Sosial sebagai penanggung jawab program, DPRD sebagai pengawas, UPKM sebagai pelaksana program di lapangan, dan masyarakat sebagai target kebijakan (Dinsos, 2018) .

Di sisi lain, di era Bu Tri Rismaharini di daerah kawasan Dupak, penduduk masyarakatnya dimintai KK dan KTP untuk mencatat administratif guna perlindungan masyarakatnya apabila sewaktu-waktu digusur oleh pihak PJKA dan meminta dukungan untuk diakui sebagai masyarakat sah surabaya karena dalam peta surabaya, daerah kawasan Dupak Magersari ini tidak terlihat kawasannya. Selain itu, ini juga sebagai syarat administratif untuk pengambilan atau penerimaan bantuan sosial dari Dinas Sosial kota Surabaya. Dengan memastikan masyarakat memiliki dokumen resmi pemerintah

bukan hanya melindungi mereka dari penggusuran ,tetapi juga dapat menerima akses program-program bagi kesejahteraan masyarakat yang dijalankan oleh Bu Tri Rismaharini dari visi inklusi sosial seperti program pendidikan,kesehatan,dan infrastruktur dasar (Hawken dkk, 2018).

Ketua RW 9 pada kampung Dupak Magersari ini memiliki kedekatan dengan pemerintah kota. Ketua RW 9 mengaku bahwa selalu melakukan komunikasi dan audiensi secara langsung dengan pemerintah kota Surabaya. Relasi ini mencerminkan posisi strategis ketua RW sebagai perantara utama antara warga kampung dan pemerintah kota, sekaligus memperlihatkan akses eksklusif yang dimiliki ketua RW. Kemudahan akses inilah yang menunjukkan adanya kecenderungan oligarki, di mana kekuasaan dan pengaruh cenderung terkonsentrasi pada segelintir aktor yang memiliki hubungan khusus dengan pemerintah kota. Pola relasi ini memperlihatkan hierarki kekuasaan, dimana ketua RW berpotensi memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan dengan tokoh lokal lainnya, sehingga menimbulkan ketergantungan antara warga dengan ketua RW.

Dalam RW 9 daerah kawasan Dupak Magersari ini terdapat beberapa RT yang belum terpasang lampu jalanan umum atau PJU (Penerangan Jalan Umum), Misalnya pada RT 1. Hingga saat ini,kawasan ini belum memiliki Penerangan Jalan Umum (PJU) yang memadai. Akibatnya,area tersebut masih gelap remang-remang ketika di malam hari yang berpotensi menimbulkan risiko keamanan dan kenyamanan masyarakat. Ketiadaan PJU ini tidak hanya memengaruhi mobilitas warga,tetapi juga kegiatan warga yang membutuhkan suasana yang terang dan aman. Sedangkan di RT 4 daerah kawasan Dupak Magersari tersedia PJU yang berfungsi dan aktif. Namun,biaya operasional seperti listrik masih ditanggung oleh masyarakat RT 4 melalui pembayaran iuran kas. Pembayaran secara mandiri ini bisa menjadi beban tambahan bagi masyarakat,terutama masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Situasi ini menekankan pentingnya dukungan dari pihak terkait,seperti pemerintah kota untuk membantu meringankan beban tersebut. Misalnya,dengan mengambil alih biaya PJU atau menyediakan subsidi.

Program bantuan pendidikan diberikan oleh pemerintah kota untuk sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Selain itu, bantuan pendidikan juga diberikan oleh pemerintah pusat. Pak Ismail selaku ketua RT 3 mengungkapkan bahwa anak warga RT nya mendapat bantuan pendidikan

melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang difasilitasi oleh Partai Golkar. Keterlibatan partai politik dalam distribusi bantuan ini menunjukkan adanya peran aktor politik dalam memfasilitasi program pemerintah (Nurhadi, 2022).

Ada juga program pemberdayaan masyarakat seperti PKSH yang berorientasi pada pemberdayaan perempuan dan keluarga. Meski begitu persoalan utama yang menjadi titik fokus disini adalah bagaimana langkah pemerintah kota untuk mengatasi masalah pemukiman liar dan *slum* yang tidak sebatas pada penyelesaian berupa pemberdayaan atau sosialisasi pada masyarakat. Akan tetapi juga solusi kebijakan berupa perbaikan fisik. Sejak 2019 lalu, Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan penyelesaian pemukiman kumuh di 21 kelurahan. Langkah ini dibuktikan dengan adanya pembangunan rumah susun sebagai solusi untuk merelokasi warga dan masyarakat ke hunian yang lebih layak. Pembangunan rumah susun untuk relokasi penduduk *slum* adalah dengan adanya situs SIM Rusun yang telah di bangun di Gunungsari, Wonokromo, Sumberwelut. pembangunan rumah susun telah terbukti efektif untuk mengatasi persoalan pemukiman liar dan kumuh meski perlu adanya sosialisasi dan pemberdayaan berkelanjutan bagi warga. Dalam kasus kampung Dupak Magersari, persoalan utamanya berkaitan dengan negosiasi yang dilakukan dengan warga sekitar. Mereka sudah menempati kawasan itu selama bertahun-tahun dan membangun rumah di sana, beberapa kali bahkan melakukan renovasi (Pramantha dkk, 2021).

Beberapa rumah juga memiliki bangunan yang cukup bagus, warga memandang jika mereka di pindah ke rusun, persoalannya tidak hanya berkaitan dengan letaknya yang jauh dari sumber kerja tetapi juga ganti rugi yang tidak setimpal. beberapa rumah di pemukiman ini bahkan telah mengalami pembangunan sehingga mereka merasa pindah ke Rusun tidak menjamin ganti rugi yang sesuai dengan apa yang telah mereka bangun di pemukiman tersebut. Untuk itu, negosiasi masih menjadi persoalan yang perlu dilakukan. Komunikasi antara warga, PJKA dan pemerintah kota bisa menjadi solusi penyelesaian masalah. Banyak kepentingan dan keinginan antar berbagai pihak yang harus diselesaikan. Dilihat dari sisi kualitas sumber daya manusianya, masyarakat Kampung Dupak Magersari memiliki kualitas pendidikan, kesehatan dan kesadaran politik yang baik. Meski begitu jurang kemiskinan dan keterbatasan finansial menjadi penghambat utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat

sebenarnya juga ingin pindah dan memperoleh tempat tinggal yang layak, sayang mereka masih bergantung pada pekerjaan informal yang menyebabkan mereka terjebak untuk tinggal di kawasan rel kereta serta tetap hidup dalam jurang kemiskinan, pendapatan yang rendah turut menghambat mereka untuk pindah rumah dan memiliki tanah sendiri.

Beberapa program bantuan yang disalurkan oleh pemerintah kota hanya ditujukan untuk program yang sejatinya tidak menyentuh langsung persoalan utama masyarakat di kampung ini. Beberapa kebijakan sebenarnya hanya ditujukan untuk memperoleh antusiasme dan suara masyarakat. Persoalan seperti pengentasan ekonomi berupa lapangan pekerjaan, infrastruktur dan kejelasan nasib pemukiman dari ancaman penggusuran juga masih belum terselesaikan. Beberapa program berupa pemberdayaan memang cukup efektif untuk mengembangkan kehidupan sosial yang aktif dan solid bagi warga sekitar. Meski sebenarnya persoalan yang lebih *urgen* terkait relokasi dan pengentasan kemiskinan belum bisa dilakukan dengan baik. Beberapa aduan dan pengajuan yang diajukan oleh warga lokal Dupak Magersari pada pemerintah kota baru saja direspon tahun 2024, meski masyarakat mengaku telah mengajukan sejak 2021, hal ini memunculkan asumsi terkait adanya *pork barrel* menjelang Pilkada terutama untuk memenangkan dukungan dari massa yang tinggal di kawasan pemukiman. Langkah ini terbukti efektif dengan klaim warga atas kepuasan mereka terhadap kinerja Wali Kota selama lima tahun terakhir. Meski secara substantif program tersebut tidak langsung tertuju pada inti persoalan slum area. Warga masih dibayangi adanya ancaman penggusuran di masa depan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Masalah perkotaan bersumber dari arus urbanisasi dan kepadatan penduduk yang terus meningkat dari masa ke masa, Kampung Dupak Magersari menunjukkan bagaimana Kota Surabaya terus mengalami perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, munculnya kebutuhan akan tempat tinggal memaksa kelompok pendatang dan rentan untuk menempati lahan yang masih kosong, seperti rel kereta api. Masyarakat tinggal di kawasan yang sama selama bertahun-tahun melahirkan dinamika sosial perkotaan yang kompleks terutama meliputi sosial ekonomi. Masalah terkait kemiskinan masih menjadi kendala utama. Kemiskinan struktural memaksa mereka tinggal di kawasan ilegal yaitu

rel kereta api karena keterbatasan kemampuan untuk pindah. Disisi lain, program yang diberikan oleh pemerintah tidak menjadi solusi atas persoalan Kampung Dupak Magersari yang merupakan kawasan pemukiman liar dan slum. Peneliti juga menemukan pola intervensi oligarki pemerintah kota dalam kebijakan terkait tanah, konflik tanah sejatinya sudah terjadi bertahun-tahun dan pemerintah Surabaya menjadikan masyarakat yang tinggal di kawasan *slum* sebagai komoditas politik hal ini tercermin dalam pola kebijakan-kebijakan yang ada.

Saran

Program kebijakan yang diberikan oleh pemerintah sejatinya sudah cukup dalam memberikan wadah pemberdayaan dan kualitas hidup. Meski begitu sebagai bagian dari wajah kota, *slum area* tidak seharusnya dibiarkan berlarut-larut, pemerintah seharusnya membantu memberikan solusi atas persoalan tanah, agar warga tetap hidup dengan aman tanpa waspada akan penggusuran sewaktu-waktu yang dilakukan oleh PT. KAI. Upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah melalui negosiasi secara sehat dan memediasi antara dua belah pihak yaitu warga, PT. KAI dan Pemerintah Kota. Selain itu pemberdayaan ekonomi lokal juga sangat penting untuk mengurangi ketergantungan warga pada sektor informal yang memaksa mereka untuk tinggal di sekitar rel, hasil temuan menunjukkan minimnya program pemerintah dalam penyediaan lapangan pekerjaan.

Melalui pemberdayaan pelatihan keterampilan, dukungan untuk usaha kecil dan pemberian akses ke modal usaha, menjadikan masyarakat dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih mapan. Alih-alih memberikan program yang bertujuan untuk kepentingan elektoral, pemerintah kota sudah seharusnya memberikan program yang sesuai dengan persoalan riil masyarakat kawasan Dupak Magersari, yaitu pengentasan kemiskinan dan jaminan tempat tinggal dan kepemilikan tanah yang jelas sehingga masyarakat dapat keluar dari jurang ketimpangan dan kemiskinan yang menyebabkan mereka memiliki ketergantungan untuk tinggal di kawasan slum. meski begitu setiap rekomendasi kebijakan akan selalu melibatkan banyak pihak, untuk itu perlu adanya sinergi antara warga, organisasi advokasi, dan pemerintah. Terutama untuk bersama-sama memiliki kesadaran dalam menciptakan wajah kota yang berkelanjutan, adil dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Asiani, Y., & Aminah, S. (2018). Politik Tata Ruang : Mesin Pertumbuhan Kota Dalam Pengembangan Kawasan Kota Baru Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Fisip*.
- Charmaz, K. (2014). *Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative Analysis* (media ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Das, A. (2017). A city of two tales: Shelter and migrants in Surabaya. *Environment and Urbanization ASIA*, 8(1), 1-21.
- Deep, G. (2023, December 25). Evaluating the impact of community engagement in urban planning on sustainable development. *World Journal of Advanced Research and R*, Dinsos Surabaya Renovasi Seribu Rumah Kumuh | BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. (2018, January 31). BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur | Situs Web Resmi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur; BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. <https://jatim.bpk.go.id/dari-media/maret-dinsos-surabaya-renovasi-seribu-rumah-kumuh/>
- Ernawati, R., Santosa, H. R., & Setijanti, P. (2013). Facing urban vulnerability through kampung development, case study of kampungs in Surabaya, Indonesia. *development*, 14, 15.
- Fatihah, T., & Nurdini, A. (2024, October). KARAKTERISTIK PERMUKIMAN INFORMAL DI SEMPADAN INFRASTRUKTUR KERETA API: STUDI OPINI MEDIA. *RUANG SPACE*, 11.
- Fatwa, A. W. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DAERAH KUMUH (RSDK) DI KELURAHAN PLOSO, KECAMATAN TAMBAKSARI, KOTA SURABAYA. *Jurnal Politik Indonesia*, 8.
- Green Infrastructure dan Green Economy Membangun Masa Depan Berkelanjutan di Indonesia*. (2024, February 12). Sekretariat Negara. Retrieved November 29, 2024, from https://www.setneg.go.id/baca/index/green_infrastructure_dan_green_economy_membangun_masa_depan_berkelanjutan_di_indonesia

- Hawken, S., & Sunindijo, R. Y. (2018). City of Kampung: risk and resilience in the urban communities of Surabaya, Indonesia. *International Journal of Building Pathology and Adaptation*, 36(5), 543-568.
- Julkarnain, D. S., Bisri, M., Khusaini, Moh., & Wijaya, A. F. (2024). Handling Strategies for Areas and Slums Settlements with the Implementation of Sustainable Development Goals in Mojokerto Regency, Indonesia. *Path of Science*, 4, 11007–11019. <https://doi.org/10.22178/pos.103-33>
- Nas, P. J. (2003). Ecumenopolis in Asia. *International Institute for Asian Studies Newsletter*, (31).
- Nisah, G. Y. K., & Handayani, S. A. (2014, Maret). PEMUKIMAN LIAR DI SURABAYA TAHUN 1970-2000 (ILLEGAL SETTLEMENTS IN SURABAYA, 1970-2000). *PUBLIK BUDAYA*, 2.
- Noorca, D. (2022, Maret 22). *Kembalikan Kejayaan, Pasar Turi Reborn Siap Jadi Pasar Grosir Terbesar di Indonesia Timur*. suarasurabaya.net. Retrieved November 29, 2024, from <https://www.suarasurabaya.net/ekonomibisnis/2022/kembalikan-kejayaan-pasar-turi-reborn-siap-jadi-pasar-grosir-terbesar-di-indonesia-timur/>
- Nurhadi, A. (2022). Politik Bantuan Sosial dalam Distribusi Program Pemerintah. *jurnal Politik dan Masyarakat*, 12(2).
- Ooi, G. L., & Phua, K. H. (2007). Urbanization and Slum Formation. *Journal of Urban Health*, 84, 27–34. <https://doi.org/10.1007/s11524-007-9167-5>
- Pramantha, R. Q., Agustian, E., Suminar, L., & Refnitasari, L. (2021, November). The characteristics of riverbank slum settlement in Indonesia. Case study: Depok, Palembang, Surabaya, and Surakarta. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 916, No. 1, p. 012012). IOP Publishing.
- Pristiandaru, D. L. (2023, May 26). *Penyebab Permukiman Kumuh dan Kriterianya Halaman all Kompas.com*. KOMPAS.Com; <https://lestari.kompas.com/read/2023/05/26/160000886/penyebab-permukiman-kumuh-dan-kriterianya?page=all>
- Suci, N. W. (2022, Desember). STRATEGI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH MELALUI PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DI SURABAYA. *Jurnal Mahasiswa*, Vol 4 No 4.

- Saud, B., & Navitas, P. (2015). Faktor-faktor Penyebab Kekumuhan Permukiman di Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya. 4 No. 1(ISSN: 2337-3539 (2301- 9271)), 34.
- Sosial, D. (n.d.). *InfoPublik - Entas Kemiskinan, Surabaya Gulirkan Program RSDK*. Portal Berita InfoPublik. Retrieved December 10, 2024, from <https://www.infopublik.id/read/255152/entas-kemiskinan-surabaya-gulirkan-program-rsdk.html?show=>
- Usop, T. B., & Ikaputra. (2018, Juli). MENELUSURI TEORI KOTA YANG BERKELANJUTAN. *Jurnal Perspektif Arsitektur*, 131
- Zubaidah, S., Rusli, B., Djaja Saefullah, A., & Widianingsih, I. (2023). An overview of slum upgrading programs in developing countries: Case study in Indonesia. *Cogent Arts & Humanities*, 10(2), 2264021.